



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BELU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALOYSIUS HALESERENS
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 427526

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.240.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 6780 m2/171 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah Seluas 1098 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
4. Tanah Seluas 1610 m2 di KAB / KOTA BELU, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	270.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI TRUK TENGGI AIR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 187.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI SEPADA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	49.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	250.864.498
F. HARTA LAINNYA	Rp.	48.900.000
Sub Total	Rp.	1.859.264.498



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.859.264.498

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.